

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Kabupaten Deli Serdang adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibukota Kabupaten ini berada di Lubuk Pakam. Kabupaten Deli Serdang dikenal sebagai salah satu daerah dari 25 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Kabupaten Deli Serdang yang dikenal sekarang ini merupakan dua Pemerintahan yang berbentuk Kerajaan (Kesultanan) yaitu Kesultanan Deli yang berpusat di Kota Medan dan Kesultanan Serdang berpusat di Perbaungan sekitar 38 km dari Kota Medan menuju Kota Tebing Tinggi.

Kondisi Geografis Deli Serdang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Deli Serdang berada 2°57' Lintang Utara sampai 3°16' Lintang Utara dan 98°33' Bujur Timur sampai 99°27' Bujur Timur dengan ketinggian 0 – 500 m di atas permukaan laut. Kabupaten Deli Serdang menempati area seluas 2.497,72 Km² yang terdiri dari 22 kecamatan dan 394 desa/kelurahan.¹

¹ Statistik Daerah kabupaten Deli Serdang 2022, Badan pusat Statistik kabupaten Deli Serdang, Hal 1

Potensi utama Kabupaten Deli Serdang adalah pertanian, pangan, perkebunan rakyat, perkebunan besar perikanan laut, dan pariwisata.

Provinsi ini berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain: Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, Sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Kabupaten Deli Serdang adalah daerah yang Tropis dikenal hanya dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Biasanya ditandai dengan jumlah hari hujan pada setiap musim. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin yang bertiup tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin yang banyak mengandung uap air berhembus sehingga terjadi musim hujan. Keadaan ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November.

Kabupaten Deli Serdang memiliki 22 Kecamatan dan memiliki 394 desa dan kelurahan. Kecamatan tersebut antara lain adalah Gunung Meriah, Tanjung Hulu Muda, sinembah, sibolangit, kotalim baru, pancur baru, namorambe, biru biru, Sinembah tanjung Muda Hilir, Bangun Purba, Galang, Tanjung Morawa, Patumbak, Deli Tua, Sunggal, Hamparan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan, Batang Kuis, Pantai Labu, Beringin, Lubuk Pakam, dan Pagar Merbau.

No	Kecamatan	Luas Wilayah	
		KM ²	%
1	Gunung Meriah	76.65	3.07
2	Sinembah Tanjung Muda Hulu	223.38	8.49
3	Sibolangit	179.96	7.20
4	Kutalimbaru	174.92	7.38
5	Pancur Batu	122.53	4.91
6	Namo Rambe	62.30	2.49
7	Biru Biru	89.69	3.59
8	Sinembah Tanjung Muda Hilir	190.50	7.63
9	Bangun Purba	129.95	5.20
10	Galang	150.29	6.02
11	Tanjung Morawa	131.75	5.27
12	Patumbak	46.79	1.87
13	Deli Tua	9.36	0.37
14	Sunggal	92.52	3.70
15	Hamparan Perak	230.15	9.21
16	Labuhan Deli	127.23	5.09
17	Percut Sei Tuan	190.79	7.64
18	Batang Kuis	40.34	1.62
19	Pantai Labu	81.85	3.28
20	Beringin	52.69	2.12

21	Lubuk Pakam	31.19	1.25
22	Pagar Merbau	62.89	2.53
	Deli Serdang	2.497.72	100.00

Tabel.2.1 Luas kecamatan kabupaten deli serdang²

Kabupaten Deli Serdang memiliki 22 Kecamatan dimana Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah mencapai 223,38 km² dan Kecamatan Deli Tua merupakan kecamatan terkecil dengan luas wilayah hanya 9,36 km².

B. Letak Demografis Kementterian Agama Deli Serdang

a. Sejarah Singkat Departemen Agama Kabupaten Deli Serdang.

Kerajaan Serdang adalah pecahan dari Kerajaan Sultan Deli, akibat terjadi suksesi penetapan tahta di Deli Serdang pada tahun 1723. Deli Serdang berasal dari nama sebuah pohon yang bernama serdang yang daunnya digunakan oleh masyarakat tempo lalu untuk dijadikan sebagai atap rumah.

Pada awalnya Kerajaan serdang dan raja rajanya memeluk agama Islam, raja sebagai kepala pemerintahan kerajaan serdang, raja sebagai kepala agama Islam *kholifatun fil Ardhi*. Raja juga sebagai kepala adat melayu.

² Jurnal bank Indonesia kabupaten deli Serdang tahun 2022

Sebagai pendamping raja dibidang agama Islam Kerajaan mengangkat seorang qodhi / muthfi untuk urusan agama Islam dan hal ikhwalnya tentang agama. Tugas qodhi adalah memutuskan hukum hukum menyangkut agama Islam diantaranya masalah pernikahan, talak/cerai, masalah pusaka, penetapan tanggal ramadhan dan hari raya idul fitri dan idul adha masing masing di daerah kabupaten Deli Serdang serta memutuskan perkara waris, maal waris dan hal hal yang berhubungan dengan agama Islam.

Putusan pengadilan (qodhi) di zaman itu hampir tidak ada bedanya antara perdata dan pidana dan kekuasaan qodhi sangat dominan, hukumnya dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum Islam. Setelah Belanda datang ke Serdang segala keputusan yang menyangkut pidana harus disetujui oleh Gubernur Hindia Belanda (khusus pidana).

Di Kerajaan Serdang sejak tahun 1928 jabatan mufti / qodhi kerajaan dihapus dan digantikan dengan Majelis Syariah Kerajaan Serdang di masa Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah. Qodhi yang pertama ialah Tengku Fachruddin dan kewenangannya sangat luas dan gajinya ditetapkan oleh kerajaan sampai tahun 1935. Selanjutnya Tengku Fachruddin digantikan oleh Tengku Yafis Ham yang baru pulang dari Kairo sampai Indonesia merdeka.

Setelah Indonesia Merdeka tanggal 17 Agustus 1945 Departemen Agama belum dibentuk, baru pada tanggal 3 Januari 1946 Departemen

Agama resmi dibentuk oleh pemerintah. Pada tahun 1948 Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Koordinator jawatan agama ditunjuk oleh pemerintah pusat H. Mukhtar Yahya berkedudukan di Bukit Tinggi. Kepala-kepala jawatan agama di tiga wilayah provinsi Sumatera itu ialah :

Teuku Daud Beureuh berkedudukan di Sumatera Utara, Nazaruddin Toha berkedudukan di Sumatera Tengah, K. Azhari berkedudukan di Sumatera Selatan

Sementara itu pada tahun 1953 Provinsi Sumatera Utara merupakan gabungan dari daerah Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli. Pusat pemerintahan di Banda Aceh. Pada Tahun 1956 struktur pemerintahan berubah lagi, pemerintah Sumatera Utara sebagai gabungan keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli berkedudukan di Medan.

Kepala jawatan agamanya adalah K. H. Muchlis. Sejak saat itu masing-masing daerah Aceh berdiri sendiri dan Sumatera Utara berdiri sendiri. Selanjutnya diatur berdasarkan peraturan-peraturan ditetapkan oleh kementerian pusat. Sedangkan pimpinan keagamaan masih dipegang oleh raja-raja yang jumlahnya tidak sedikit dan peraturannya pun masing-masing sesuai dengan kondisi masyarakat pada waktu itu. Setelah Indonesia merdeka disetiap keresidenan dibentuk Komite Nasional Daerah Sumatera Timur yang merupakan legislatif dan badan-badan agama. Saat itu sudah ada qadhi.

Selanjutnya struktur ketatanegaraan berubah, kedua residenan Sumatera Utara dan Tapanuli digabung menjadi satu, menjadi Provinsi Sumatera Utara sehingga jawatan agama ikut menyesuaikan diri. Dan struktur kementerian agama berangsur-angsur disempurnakan dan pelaksanaannya baru bisa disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1952 dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Jawatan Urusan Agama, terdiri atas:

Kantor Urusan Agama Provinsi, Kantor Urusan Agama Daerah, Kantor Urusan Agama Kabupaten, Kantor Urusan Agama Kecamatan

2. Jawatan Pendidikan Agama, terdiri atas :

Kantor Pendidikan Agama Provinsi, Inspeksi Wilayah, Kantor Pendidikan Agama Kabupaten.

Perkembangan Organisasi Departemen Agama pada tahun 1965 sampai tahun 1974. Sebelum ada peraturan atau Keputusan Menteri Agama, Kabupaten Deli Serdang bergabung dengan Kota madya Medan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 1967 tentang struktur organisasi, Tugas dan Wewenang Instansi Departemen Agama Daerah terdiri dari : Perwakilan Departemen Agama Provinsi, Perwakilan Departemen Agama Kabupaten, Kantor Urusan Agama Kecamatan.

